

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi yang terjadi pasca lengsernya Soeharto telah memberikan perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional. Dalam konteks yang terjadi ini, berbagai dimensi yang menyangkut struktur, personil, aturan, dan berbagai karakter sistem pemerintahan yang belum berubah, menyulitkan pemerintahan transisi manapun untuk secara efisien menjalankan pemerintahannya (Kaloh, 2007: 16). Oleh karena itu ketika tuntutan otonomi daerah digulirkan, publik tidak memberikan reaksi yang berlebihan, sebagaimana euphoria reformasi yang terjadi pada saat menjelang dan lengsernya Soeharto.

Ketika otonomi daerah sedang marak dibicarakan di DPR, berkembang beberapa reaksi dari masyarakat, yaitu: *Pertama*, respon terhadap sikap rezim transisi, yang dipandang tidak layak melahirkan kebijakan yang strategis. *Kedua*, respon menolak proses pembahasan yang dianggap tidak transparan, penuh rekayasa, yang diperkirakan dapat memperkeruh keadaan. *Ketiga*, respon yang pesimis, bahwa proses tersebut hanya merupakan bagian dari strategi penguasa menarik simpati rakyat, dan cenderung *lip service*, yang kemudian melahirkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan Pemerintah Daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Kaloh, 2007: 61). Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong otonomitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri.

Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat. Melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya. Sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Kewenangan artinya keleluasaan menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat, sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pusat, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang memadai, yang berdasarkan atas kriteria objektif dan adil.

Pada tahun kelima implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 – tepatnya tahun 2004 – dengan berbagai latar belakang pertimbangan sebagai akibat dari dampak implementasi UU tersebut, muncul kehendak dari pemerintah untuk

mengadakan revisi terhadap UU tersebut, yang pada akhirnya memunculkan undang-undang pemerintahan daerah yang baru, yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Banyak evaluasi dari berbagai kalangan yang dialamatkan pada implementasi UU No.22 Tahun 1999 ini, sehingga perlu direvisi, khususnya yang bearoma negative antara lain bahwa demokrasi yang dikembangkan oleh jiwa UU ini kurang begitu mendukung terciptanya demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. UU ini cenderung menghasilkan demokrasi yang ‘kebablasan’ dan memunculkan ‘raja-raja’ kecil di daerah (Kaloh, 2007: 69).

Oleh sebab itu muncul lah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut : “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sejak mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah di seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralistik dan

didominasi oleh Pemerintah Pusat mulai ditinggalkan. Sedangkan Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional.

Dalam era otonomi, campur tangan pusat semakin berkurang dan daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing, maka sistem perencanaan pembangunan daerah sekarang lebih banyak memperhatikan potensi dan karakteristik khusus daerah. Sedangkan perencanaan nasional lebih banyak memberikan arah dan sasaran umum agar pembangunan daerah dapat di koordinasikan dengan baik dan efisien.

Dalam perencanaan pembangunan, penerapan pendekatan yang tadinya adalah bersifat *top down* digantikan oleh pendekatan *bottom up*. Meskipun demikian penerapan kedua pendekatan tersebut agar jangan dipertentangkan secara tegas. Dalam pendekatan *bottom up* masih dirasakan pengaruh *top down* meskipun relatif kecil. Demikian sebaliknya dalam perencanaan *top down*, harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat bawah.

Rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam), sumberdaya manusia, sumberdaya modal, prasarana dan sarana, teknologi dan lain-lain. Karena dana anggota pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan: (1) penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang

terukur. (2) didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif, yang merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. Pembangunan partisipatif dilakukan, berdasarkan (1) tahapan-tahapan dari kegiatan yang harus dilakukan, (2) analisis-analisis apa yang harus dikerjakan, sampai kepada (3) penyusunan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan akhirnya adalah (4) implementasi dari program/proyek pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dilakukan dengan menggunakan kriteria yang terukur terhadap berbagai program/proyek yang diusulkan (Adisasmita, 2006:42).

Perencanaan partisipatif masih merupakan paradigma yang relevan. Masyarakat sebagai sumber daya pelaku pembangunan di suatu daerah harus diberdayakan dalam penyusunan rencana/program pembangunan, karena mereka adalah yang paling mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, dan kepentingan menurut kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, bahwa



masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, timbulnya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri (Coyes, 1991: 154).

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal ini penyusunan rencana/program pembangunan dilakukanlah penentuan prioritas, dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2006: 39).

Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat memungkinkan terjadinya sinergi antara kinerja lembaga pemerintah daerah dengan berbagai komponen pelaku pembangunan dari pihak masyarakat dan swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi dan ormas lainnya. Perlibatan seluruh pelaku pembangunan dalam proses pembangunan tersebut mencerminkan proses demokratisasi dapat dijalankan serta adanya komitmen bersama untuk membangun daerah dalam suasana otonomi dan desentralisasi secara konsekuen. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan memberikan kemudahan bagi pengambilan keputusan, termasuk pengambilan kebijakan yang mengenalkan

masyarakat pada berbagai faktor dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga akan tumbuh pemahaman masyarakat itu sendiri.

Dengan era otonomi daerah yang tengah dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dengan asas desentralisasi ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang luas menjadi semakin baik dan meningkat. Lagipula, pola pendekatan perencanaan pembangunan ini sekaligus menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang sangat baik bagi masyarakat. Hal ini tercermin bagaimana masyarakat secara menyeluruh mampu melakukan proses demokratisasi yang baik melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan semua unsur warga masyarakat

Salah satu contoh daerah otonomi yang berhasil dalam membangun daerahnya adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten ini baru genap berusia 11 tahun. Usia yang masih tergolong muda untuk sebuah daerah pemerintahan. Namun jangan pernah sangsikan prestasi yang telah dicapainya. Roda perekonomian dan pembangunan disana berputar sangat cepat. Deru pembangunan menggema hingga pelosok-pelosok kampung. Kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat pun semakin baik. Angka kemiskinan terpankas secara signifikan. Dan tak ketinggalan sederet penghargaan telah dialamatkan kepada daerah yang tengah menggeliat ini.

Program pemerintah yang dicetuskan oleh Bupati Sumbawa Barat Zulkifli Muhadli adalah Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), yang didukung anggaran puluhan miliar rupiah. Melalui kebijakan sarat inovasi yang pro poor ini Pemerintah Sumbawa Barat berupaya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerahnya sendiri. Kini partisipasi masyarakat bukan hanya sebatas

perencanaan saja, tetapi juga dalam pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi seluruh sektor pembangunan. Program ini bukan hanya telah menyatu dengan keseharian masyarakat Sumbawa Barat saja, namun juga telah membuahkan sejumlah penghargaan. Tak terhitung sudah berapa jumlah lembaga baik pemerintah maupun swasta yang datang untuk mempelajari keunikan dan keunggulan program ini untuk kemudian diterapkan di daerah masing-masing ([www.leadership-park.com](http://www.leadership-park.com)).

Sebagai daerah otonom yang mendapatkan prestasi di tingkat nasional adalah Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, hasil dari pemekaran Kabupaten Deli Serdang, dengan kegiatan perekonomian terfokus pada pertanian dan perkebunan.

Perjalanan panjang proses pemekaran Kabupaten Deli Serdang secara hukum dimulai dari ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor: 13/KP/Tahun 2002 Tanggal 2 Agustus 2002 Tentang Persetujuan Pembentukan/ Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya DPRD Propinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Nomor: 18/K/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 menetapkan Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. DPRD Kabupaten Deli Serdang melalui Keputusan Nomor 26/K/DPRD/2003 Tanggal 9 Maret 2003 menetapkan Persetujuan Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten



Serdang Bedagai sebagai Kabupaten Pemekaran dengan ibukota Sei Rampah ([www.serdangbedagaikab.go.id](http://www.serdangbedagaikab.go.id)).

Pertimbangan nama Kabupaten Serdang Bedagai didasarkan pada sejarah dimana wilayah ini dahulu berada dalam wilayah Kesultanan Serdang dan Kesultanan Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai yang beribukota Sei Rampah adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 7 Januari 2004 (yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Serdang Bedagai).

Bupatinya pertama adalah Ir. H. T. Erry Nuradi MBA, Wakil Bupati pertama adalah Ir. H. Soekirman, serta Sekretaris Kepala Daerah pertama adalah Ir. H. Djaili Azwar, M.Si. Ketiga pimpinan ini dikenal sebagai pimpinan yang sangat kompak (dapat dilihat pada Bab 3 hal. 67), sehingga menjadikan Serdang Bedagai menjadi Kabupaten Pemekaran Terbaik di Indonesia, dan Kabupaten terbaik di Sumatera Utara. Proses lahirnya undang-undang tentang pembentukan Sergai sebagai kabupaten pemekaran merujuk pada usulan yang disampaikan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang atas usul rencana pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) yaitu: Kabupaten Deli Serdang (Induk), dan

Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan potensi luas wilayah 1.900,22 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 95 Km, terdiri dari 17 kecamatan dan 237 desa dan 6 kelurahan yang dihuni sekitar 605.583 jiwa (data BPS tahun 2014).

Visi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah menjadikan Serdang Bedagai sebagai salah satu kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasila, modern, religius dan kompetitif. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyadari bahwa mereka tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Berangkat pada pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mencanangkan strategi pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama “Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat” atau yang lebih dikenal dengan “Gerbang Swara” (Dinas BPMD Kabupaten Serdang Bedagai).

Gerbang Swara (Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat) merupakan gerakan kolaborasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan mulai diluncurkan pada tahun 2005 ([www.sapa.or.id](http://www.sapa.or.id)). Dalam kegiatan ini dirumuskan mengenai mekanisme pelibatan unsur masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dapat ditumbuhkan sehingga masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan melainkan subjek pembangunan.

Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara) berarti membangun daerah dengan memotivasi dan menggali dari rasa tanggung jawab kemanusiaan

dimana setiap orang pada hakekatnya mencintai daerahnya, mencintai tempatnya bekerja dan merasa tergugah untuk membangun ke arah yang lebih baik. Intinya Gerbang Swara ini bersumber dari masyarakat sekitar tidak tertutup juga kemungkinan dari putera daerah yang berhasil di luar yang ingin memajukan daerahnya termasuk juga perusahaan perkebunan di dalamnya. Gerbang Swara meliputi semua swadaya masyarakat.

Tujuan Gerbang Swara adalah menggerakkan seluruh potensi dan prakarsa masyarakat Serdang Bedagai untuk berpartisipasi dalam pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Melalui “Gerbang Swara” masyarakat bukan sekadar menjadi obyek pembangunan, tetapi menjadi pelaku (subyek) pembangunan. Pemerintah hanya menjadi dinamisor dan fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi aktor dari semua kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Gerbang Swara tidak memiliki anggaran karena semua kegiatannya bersumber pada masyarakat dan sifatnya swadaya masyarakat. Masyarakat dengan sukarela menyumbang baik itu tenaga, uang maupun bahan-bahan bangunan. Kegiatan-kegiatan yang berhasil dilakukan berupa pembangunan jalan, jembatan, irigasi, rumah ibadah dan parit. Ada beberapa kegiatan masyarakat yang nilainya tidak berupa rupiah tetapi dirupiahkan, itulah kenapa muncul angka-angka di dalam Gerbang Swara ini. Informasi ini didapat berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan di Dinas BPMD (Badan Pemerintahan Masyarakat Desa).

Gerbang suara tidak dikelola secara lembaga tetapi untuk membangkitkan rasa gotong royong tersebut masyarakat tetap didata untuk mengetahui siapa-siapa saja yang telah banyak menyumbang untuk Gerbang Swara. Sebagai reward untuk masyarakat maka Bupati memberikan piagam penghargaan untuk masyarakat yang diberikan pada saat hari jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini dapat menambahkan kebanggaan atau stimulus bagi masyarakat itu sendiri maupun camat dan kepala-kepala desa agar lebih aktif dalam memajukan daerahnya.

Berkat terbentuknya Gerbang Swara tersebut Bupati Serdang Bedagai Ir. H. Soekirman terpilih dan menerima penghargaan sebagai nominator unggulan Innovative Government Award (IGA) tahun 2013 dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni di Jakarta. Mendagri RI, Gamawan Fauzi dalam penjelasannya mengatakan:

*“Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, banyak Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi melalui pengembangan ”program inovasi daerah” dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kementerian Dalam Negeri mencermati berbagai kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah tersebut, sehingga diapresiasi dan diberi penghargaan. Untuk memberikan penghargaan inovatif kepada Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian untuk menemukan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 4 (empat) kategori penilaian untuk menetapkan Pemenang IGA Tahun 2013, yakni: (1) tata kelola pemerintahan; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, setiap Kepala Daerah memiliki diskresi kewenangan untuk mengembangkan program inovasi daerah sesuai dengan karakteristik masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat di daerah (www.DNAberita.com).”*

Kabupaten Sergai terpilih menerima penghargaan bersama 24 Kabupaten/Kota lain se Indonesia, berkat inovasi yang dilakukan Pemkab Sergai



melalui program Gerbang Swara yang dicanangkan Bupati Sergai Ir, H. Soekirman untuk meningkatkan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat dan untuk memajukan serta mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian mengenai faktor-faktor keberhasilan program Gerbang Swara menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan sebagai kabupaten baru, Kabupaten Serdang Bedagai telah mendapatkan penghargaan-penghargaan tingkat nasional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang bergerak timbal balik. Disatu pihak, rencana pembangunan akan menunjukkan berbagai proyek yang harus dijalankan di suatu daerah dan ini selanjutnya menunjukkan tugas yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam usaha untuk menciptakan pembangunan nasional. Dilain pihak Pemerintah Daerah dapat pula menunjukkan kepada Pemerintah Pusat tentang proyek-proyek yang sebaiknya dilaksanakan di daerah tersebut. Jadi sebelum proyek-proyek di berbagai daerah ditentukan, kegiatan perencanaan yang baik perlu mengadakan dialog diantara perencanaan pusat dan perencanaan daerah.

Memang pada akhirnya keputusan dalam menentukan prioritas dari pelaksanaan proyek-proyek dan penentuan jenis proyek yang akan dijalankan diberbagai daerah terletak ditangan Pemerintah Pusat. Walaupun demikian, adanya partisipasi daerah akan banyak sekali manfaatnya dalam mempertinggi efisien alokasi sumber-sumber daya ke berbagai daerah dan dalam mengusahakan alokasi yang adil ke berbagai daerah. Salah satu tugas dari perencanaan pusat adalah membuat suatu



program untuk menyebarkan proyek-proyek ke berbagai daerah dengan tujuan agar penyebaran tersebut memberikan sumbangan yang optimal kepada usaha Pemerintah untuk membangun daerahnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ***“apa saja yang menjadi faktor-faktor keberhasilan Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara) di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dan apa yang menjadi faktor dominan Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara).”***

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berangkat dari perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor keberhasilan Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara) di Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi dari faktor-faktor keberhasilan Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara) di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Menjelaskan faktor yang dominan dalam pelaksanaan Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara).

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada dua aspek yaitu:

1. Bagi Aspek Akademis yaitu memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Pembangunan Perdesaan.
2. Bagi Aspek Praktis yaitu sebagai acuan bagi penelitian lain yang permasalahannya berkaitan dengan indikator keberhasilan Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara).

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Perspektif Sosiologis

Pengertian partisipasi selalu bersinonim dengan peran serta. Sajogyo mengemukakan definisinya tentang partisipasi:

*“Partisipasi dapat didefinisikan kedalam tiga artian, yaitu: (1) masyarakat berpeluang ikut menentukan kebijakan, (2) adanya peluang ikut melaksanakan pembangunan, (3) adanya peluang ikut mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan.”*

Menurut Lawang mengenai partisipasi menyatakan bahwa:

*“Partisipasi terjadi karena adanya pengaruh budaya di dalamnya.”*

Sedangkan menurut World Bank mengenai partisipasi adalah sebagai berikut:

*“Proses yang di dalamnya setiap stakeholder memiliki pengaruh dan memiliki kontrol atas penetapan prioritas , pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, dan akses pada barang dan pelayanan publik.”*

Dari uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi lebih dapat terselenggara dalam masyarakat, apabila masyarakat merasa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan dan masyarakat ikut mengawasi kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan. Pemerintah juga memiliki peran mengontrol kegiatan pembangunan tersebut, pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus saling mampu bekerja sama. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan pernah mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Tetapi sebaliknya, tanpa peran pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan juga terarah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tjokroamidjojo bahwa partisipasi memiliki empat aspek penting dalam pembangunan yaitu:

1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu dengan sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana (Tjokroamidjojo, 1993: 222-224).

Kalau pembuat keputusan masyarakat tidak dilibatkan maka akan terjadi kerancuan yang berdampak negatif pada rasa kepedulian dan kepemilikan. Pemberdayaan/kendali, masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek tetapi juga subyek yang menjalankan program yang direncanakan bersama.

Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat, mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggungjawab, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi sering kali ditentukan dari banyaknya individu yang dilibatkan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan pengambilan keputusan (Adisasmita, 2006:38).

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok, serta masyarakat

memperbaiki keadaan mereka sendiri, karena mereka sendirilah yang tahu akan apa yang menjadi kebutuhannya tersebut. Disamping itu, mereka juga akan merasa memiliki dan bertanggungjawab tentang apa yang telah mereka hasilkan dan apa yang telah mereka manfaatkan.

### **1.5.2 Gerbang Swara (Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat)**

Gerbang Swara (Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat) merupakan gerakan kolaborasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan yang mulai diluncurkan pada tahun 2005. Gerbang swara ini mempunyai landasan hukum yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Serdang Bedagai Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara). Di dalam Instruksi Bupati tersebut diminta agar seluruh aparat jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk:

- a. Mensosialisasikan Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara) kepada seluruh jajarannya beserta seluruh lapisan masyarakat.
- b. Secara terpadu menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan ini dengan seluruh instansi pemerintah bersama-sama masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, BUMN, perusahaan swasta termasuk masyarakat luar Kabupaten Serdang Bedagai sebagai simpatisan untuk membangun Kabupaten Serdang Bedagai baik melalui kegiatan jumat bersih maupun kegiatan sadar lingkungan dan kegiatan pembangunan lainnya.
- c. Melaksanakan pengadministrasian yang tertib dan berkesinambungan serta melakukan sosialisasi setiap tahunnya.



- d. Mempersiapkan dukungan dana melalui APBD Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahun berjalan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Tujuan Gerbang Swara adalah suatu gerakan pembangunan untuk mewujudkan tercapainya semangat membangun yang tinggi dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan Swadaya Gotong Royong berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui Gerbang Swara masyarakat bukan sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi pelaku (subyek) pembangunan yang sesungguhnya. Pemerintah hanya menjadi dinamisator dan fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi aktor dari semua kegiatan pembangunan yang dilakukan. Dengan kata lain, pembangunan diterapkan dengan menggunakan prinsip: Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOM).

### **1.5.3 Penelitian Relevan**

Penelitian dahulu yang relevan pernah dilakukan oleh Siagian pada tahun 2010 dengan judul, “Dampak Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara) Terhadap Pengembangan Wilayah Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai”. Tujuan Penelitian pertama yaitu untuk menganalisis dampak pelaksanaan Gerbang Swara terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Tanjung Beringin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yakni sebesar 10,23 persen. Sedangkan tujuan penelitian kedua yaitu untuk menganalisis dampak pelaksanaan Gerbang Swara terhadap kepadatan dan pertumbuhan penduduk

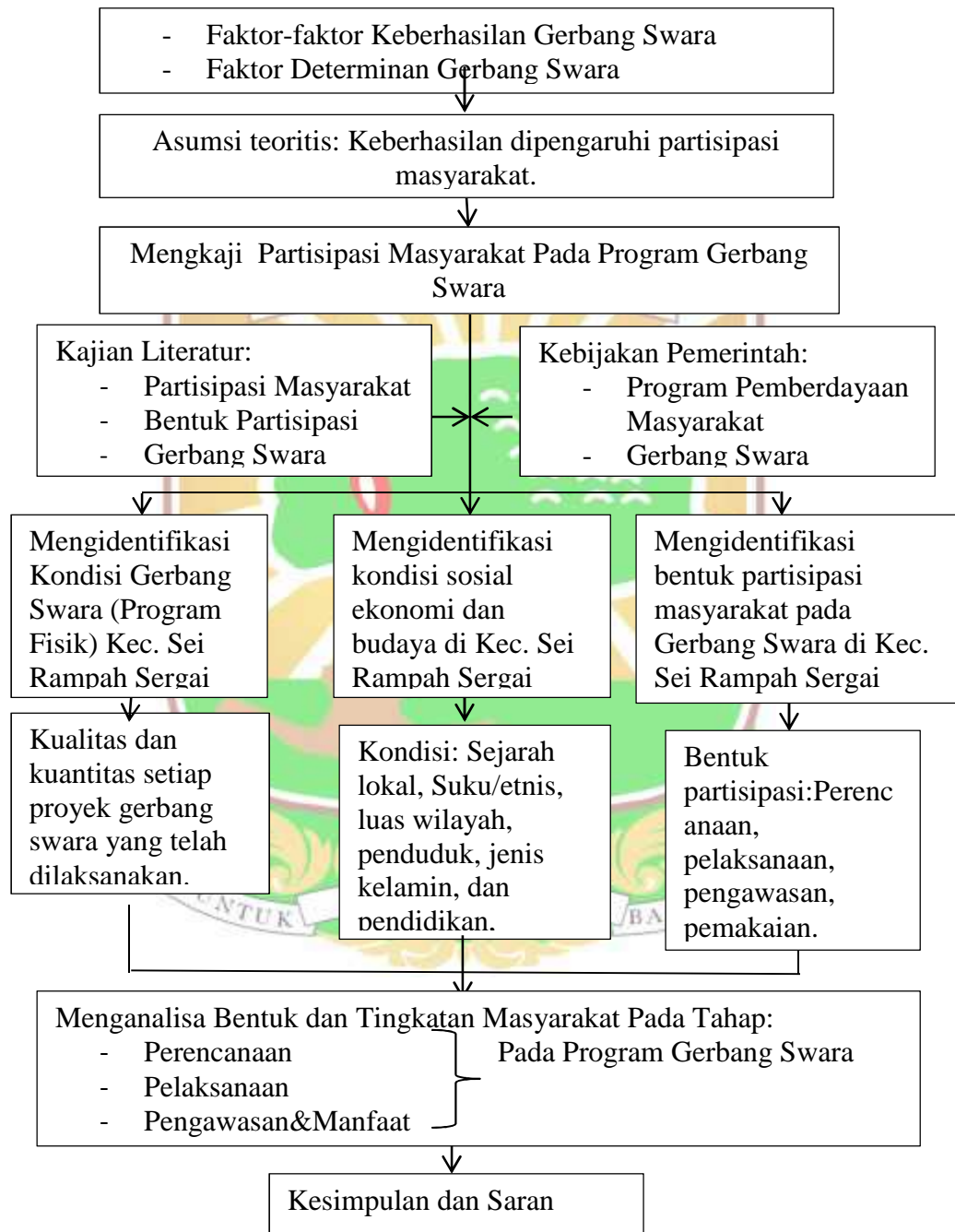
di Kecamatan Tanjung Beringin dengan hasil penelitian tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Tanjung Beringin setelah adanya Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat bertambah sebesar 26 jiwa/km<sup>2</sup>. Namun tidak terdapat peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tanjung Beringin.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihite pada tahun 2015 dengan judul, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Implementasi Program Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara) di Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai)”. Tujuan Penelitian yaitu ingin mengetahui penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil penelitian bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat rendah, hal tersebut dikarenakan latar belakang ekonomi dari masyarakat dimana lebih memilih untuk bekerja di ladangnya daripada mengikuti rapat, tidak adanya penyerahan hak milik lahan masyarakat terhadap pemerintah, respon yang kurang terhadap Program Gerbang Swara serta kurangnya sosialisasi dan ajakan dari aparat pemerintah desa. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebaiknya lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memprioritaskan kepentingan masyarakat serta warga Desa Bandar Tengah lebih banyak berperan untuk ikut ambil andil dalam setiap program masyarakat yang ditujukan ke desa tersebut.

#### 1.5.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat secara sederhana pada Gambar 1.1



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran penelitian**

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah Pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia, bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2008:14).

Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan penelitian ini berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial. Hal ini dapat menginformasikan penyebab sebuah kejadian adalah respon orang atau kelompok sosial terhadap aksi orang lain atau kelompok sosial lain serta aksi orang lain mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan dan ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi orang lain dan bagi masyarakat (Afrizal, 2008:41). Penggunaan metode ini akan memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subyek penelitian (Moleong, 1998:6).

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 1995; 20). Dengan pendekatan dan tipe

penelitian ini, diharapkan mampu untuk memberikan gambaran yang utuh tentang faktor keberhasilan dari program Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat dan mengetahui faktor dominan dari Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara).

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Didalam penelitian kualitatif informan digunakan sebagai sumber data utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Intinya, informan penelitian adalah orang-orang yang mengetahui segala situasi dan lokasi penelitian dan paham tentang permasalahan penelitian dan dapat memberikan penjelasan sesuai kebutuhan penelitian.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik tertentu yang tujuannya adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi yang menjadi dasar penulisan laporan. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu mekanisme pencarian informan penelitian seperti ini dilakukan apabila peneliti dengan mengetahui kriteria siapa saja yang dapat pantas dijadikan informan penelitian (Afrizal, 2008:101).



Dalam penelitian ini jumlah informan yang peneliti ambil adalah 10 orang. Informan tersebut merupakan informan yang termasuk dalam gambaran kriteria informan yang telah ditetapkan, gambaran kriteria terhadap pemilihan informan yaitu:

1. Informan adalah masyarakat yang ikut menjalankan dan mendukung program gerbang swara tersebut.
2. Informan adalah pengelola program Gerbang Swara ditingkat kabupaten yang dibawah oleh Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
3. Informan adalah pengelola program Gerbang Swara di tingkat Desa, Seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa atau staf Pemerintah Desa.



**Tabel 1.1**

**Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Desa	Bentuk Partisipasi
1	Dedi	Sei Rampah	Pengelola
2.	Edison	Firdaus	Pengelola
3.	Jamuri	Sei Rampah	Pengelola
4.	M. Damis	Sei Rejo	Hibah tanah untuk akses jalan
5.	Acuan	Sei Rampah	Sumbangan bahan-bahan bangunan untuk pembuatan musholla, jembatan dan gedung sekolah dasar
6.	Pantun	Firdaus	Pembuatan Tali Air sepanjang.
7.	Asmin	Pematang Pelintahan	Pembuatan saluran pembuangan irigasi
8.	Turut	Sei Rampah	Hibah tanah untuk tanah wakaf
9.	Edi	Firdaus	Hibah tanah buat akses jalan
10.	Marun	Firdaus	Hibah tanah buat akses jalan

**1.6.3 Data yang telah diambil**

Sumber data adalah salah satu paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga berbeda dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang digunakan dalam penelitian ini. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan saat proses penelitian berlangsung dan data ini diambil melalui proses wawancara secara mendalam. Dari

observasi awal yang dilakukan, data primer yang akan diambil berasal dari aktor-aktor yang terlibat dalam keberhasilan program Gerbang Swara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian ini, serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari referensi-referensi mengenai otonomi daerah, pembangunan pedesaan, pembangunan partisipatif, partisipasi masyarakat, gerbang swara, kemudian hasil-hasil tulisan yang ada diwebsite. Data sekunder yang berhasil didapatkan dari website yaitu definisi Gerbang Swara dan bahan tentang partisipasi masyarakat.

#### **1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yakni dengan teknik observasi dan melalui teknik wawancara. Teknik observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra, dengan observasi kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian (Afrizal, 2008:25).

Hal yang diobservasi adalah daerah yang melaksanakan program Gerbang Swara dan pembangunan seperti apa yang termasuk ke dalamnya. Sebelumnya peneliti telah mendapatkan informasi daerah mana saja yang melaksanakan program Gerbang Swara, setelah mendapatkan informasi peneliti mulai mencari dan mengamati pembangunan fisik yang telah nampak di daerah tersebut.

Sedangkan teknik wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

suatu data tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dan hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Jenis wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara tidak berstruktur (wawancara bebas) yaitu seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan hanya pertanyaan umum yang kemudian dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya (Afrizal, 2008:16).

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan terhadap informan adalah wawancara mendalam karena dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, peneliti mendapatkan data dan informasi-informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari informan tentang faktor-faktor keberhasilan gerbang swara di Kabupaten Serdang Bedagai.

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data sebanyak mungkin dengan cara berdialog langsung dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini yang telah peneliti wawancarai adalah 10 orang informan, yaitu 7 informan dari masyarakat yang menjalankan program Gerbang Swara dan 3 informan dari pengelola program Gerbang Swara.

#### **1.6.5. Proses Penelitian**

Wawancara ini dilakukan mulai tanggal 10 Februari – 3 Maret 2015. Peneliti mencari data tempat tinggal informan ke Dinas BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), setelah data di dapat peneliti mendatangi tempat tinggal informan. Setelah rumah informan di dapat kemudian peneliti memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan peneliti kepada informan. Peneliti sedang melakukan penelitian dan ingin mewawancarai informan mengenai program Gerbang Swara. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pada awal wawancara peneliti fokus pertanyaan yang akan diajukan kepada informan adalah mengenai identitas data informan setelah itu pertanyaan mengenai faktor-faktor keberhasilan program Gerbang Swara di Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaksanaan wawancara peneliti dilakukan di kantor BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), di kantor Kepala Desa dan di rumah informan. Pada saat penelitian berlangsung peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang membantu proses wawancara seperti daftar pedoman wawancara, buku catatan, pena, tape recorder atau alat perekam lainnya, dan kamera.

#### **1.6.6 Unit Analisis**

Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain obyek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok. Kelompok disini adalah masyarakat yang terdapat di empat desa yang ikut berpartisipasi dalam Gerbang Swara dan Pemerintah Daerah setempat.



### 1.6.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dimulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan kemudian menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan data-data sekunder. Analisis data selama melakukan penelitian tersebut merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat menolong si peneliti untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas disebabkan peneliti telah memikirkan dan menyusun strategi guna mengumpulkan data selanjutnya pada masa proses pengumpulan data (Afrizal, 2008:54).

Setelah wawancara selesai peneliti langsung membuat kembali hasil wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat di lapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (*field note*), kemudian dikumpulkan dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh kemudian baru dianalisa secara kualitatif (Nasution, 1992:26).

Analisis data dilakukan secara bertahap, dari hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan. Setelah hasil wawancara terkumpul, peneliti langsung mengetik hasil wawancara yang didapatkan. Hal ini dilakukan supaya hasil wawancara yang belum sempat tercatat dapat peneliti ingat kembali. Selama pembuatannya peneliti tidak mau diganggu oleh siapapun, agar konsentrasi peneliti

tidak terpecah. Setelah diketik, peneliti edit kembali hasil ketikan tersebut dan memasukkannya kedalam klasifikasinya/kelompoknya.

Analisis data selama melakukan penelitian tersebut merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat menolong peneliti untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas disebabkan peneliti telah mulai memikirkan data dan menyusun strategi guna mengumpulkan data selanjutnya pada masa proses pengumpulan data. Pengumpulan data selanjutnya dipengaruhi oleh analisis data yang telah terkumpul (Afrizal, 2008:55).

#### 1.6.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Kecamatan Sei Rampah memiliki 17 Desa namun tidak semua desa melaksanakan program Gerbang Swara ini, hanya ada 7 Desa yang ikut berpartisipasi dalam program Gerbang Swara tersebut, dari 7 desa tersebut peneliti memilih 4 desa yaitu Desa Sei Rampah, Desa Firdaus, Desa Sei Rejo dan Desa Pematang Pelintahan yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

#### 1.6.9 Definisi operasional

1. **Gerakan** adalah Perbuatan atau keadaan yang dilakukan masyarakat dalam proses pembangunan di daerahnya.
2. **Pembangunan** adalah Usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan masyarakat atau warga agar menuju ke arah yang lebih baik (modernitas).

3. **Pembangunan Daerah** adalah Proses pengarahan, pengerahan dan pengendalian dalam upaya pemanfaatan sumber daya daerah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan melalui kebijakan dan strategi yang terpadu secara internal dan eksternal.
4. **Swadaya** adalah Kegiatan sukarela yang dilakukan masyarakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
5. **Rakyat** adalah penduduk yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program Gerbang Swara tersebut. Penduduk disini adalah mereka yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah (daerah).
6. **Gerbang Swara** adalah Gerakan pembangunan swadaya rakyat yang mempunyai pengertian sebagai gerakan kolaborasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan.

